

## MASYARAKAT DAN TATA KELOLA SUMBER DAYA AIR: PARTISIPASI DAN KONTESTASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DI GUNUNG KAWI, KABUPATEN MALANG

Irza Khurun'in<sup>(1)</sup>, Genta Mahardhika Rozalinna<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup>irza.khurunin07@ub.ac.id, <sup>(2)</sup>gmrozalinna@ub.ac.id

<sup>(1)</sup> Dosen Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Brawijaya

<sup>(2)</sup> Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Brawijaya

### ABSTRACT

*Water crisis has become a global phenomena. In Indonesia, water scarcity is spreading in many regions. Drought and water crisis are problem that must be faced by Indonesia's society. Malang, a region in East Java Province actually has abundant water resources, as it has around 48 water springs. Since 2012, however, Malang Region experienced with water crisis. It was estimated that 13 district (kecamatan) from 33 district in this Region experienced in water crisis. It is very interesting to assess what happens in Malang where it has abundant water springs but has to face water crisis. Hipotetically, there is a problem in terms of water governance in Malang Region. This paper focus to assess water governance in Malang Region especially in Gunung Kawi's society. This paper argues that the vulnerability over water supply may be significantly reduced when there is a community participation and water governance is established by creating collaboration among stakeholders. The benefit of controlling water supply, however, may trigger contestation if the economic perspective overpowers environmental or social perspectives is dominated.*

**Keywords: governance, water resources, society participation, contestation.**

### ABSTRAK

Krisis air telah menjadi fenomena global. Kerentanan atas ketersediaan air menjadi hal yang semakin meluas di Indonesia. Bencana kekeringan dan krisis air bersih menjadi tantangan yang akan semakin intens dihadapi masyarakat Indonesia. Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memiliki potensi sumber daya air yang cukup kaya. Meski memiliki 48 sumber mata air yang tersebar di 33 kecamatan, krisis air menjadi salah satu permasalahan yang mengancam Kabupaten Malang. Pada tahun 2012 terdapat 13 kecamatan dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang yang mengalami krisis air. Terjadinya krisis air pada daerah yang memiliki sumber daya air yang melimpah mengindikasikan adanya persoalan yang sedang terjadi dalam tata kelola sumber daya air. Paper ini memfokuskan pada pengkajian atas pengelolaan sumber mata air di wilayah Gunung Kawi, Kabupaten Malang, utamanya terkait dengan pola-pola partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sumber daya berikut kontestasi kuasa yang terbangun. Paper ini berargumen bahwa kerentanan atas air dapat dikelola tatkala partisipasi masyarakat menjadi pondasi dalam tata kelola sumber data. Namun demikian, perkembangan dalam pengelolaan sumber daya juga memicu tumbuhnya kontestasi kuasa antar aktor tatkala terjadi transformasi pemanfaatan sumber daya kearah profit ekonomi.

**Kata Kunci: tata kelola; sumber daya air; partisipasi masyarakat, kontestasi.**

## PENDAHULUAN

Kabupaten Malang tercatat telah mengalami krisis air di tengah keberlimpahan sumber-sumber mata air yang dimilikinya. Pada tahun 2012, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur (2012) memaparkan temuannya terkait terjadinya krisis air di 13 kecamatan dari 33 kecamatan di Kabupaten Malang. Ironisnya, di antara 13 kecamatan yang mengalami krisis air tersebut juga memiliki sumber-sumber mata air.

Selain persoalan terjadinya musim kemarau, hal lain yang turut berkontribusi terhadap terjadinya krisis air adalah menurunnya debit air dari sumber-sumber mata air yang ada di 13 kecamatan tersebut (WALHI Jatim, 2012). Munculnya situasi di atas menunjukkan adanya persoalan terkait tata kelola sumber mata air di Kabupaten Malang. Salah satu penyebab dari persoalan tata kelola sumber mata air di Kabupaten Malang adalah minimnya upaya konservasi yang dilakukan baik oleh warga maupun pemerintah (Buwono, Muda, dan Arsad, 2017). Terdapat kecenderungan dimana masyarakat dan pemerintah kabupaten lebih banyak mendekati sumber-sumber mata air pada aspek pemanfaatan, namun masih belum optimal pada aspek perlindungan dan pelestarian.

Masih belum optimalnya upaya-upaya perlindungan dan pelestarian sumber-sumber mata air di Kabupaten Malang semakin diperparah dengan adanya beberapa aktivitas masyarakat yang menambah beban atas fungsi sumber-sumber mata air. Pertambahan penduduk, pembukaan lahan pertanian baru, hingga penebangan-penebangan pohon di sekitar sumber mata air memberi tekanan yang semakin besar bagi sumber mata air. Pada sisi yang lain, upaya konservasi atas sumber-sumber mata air masih cenderung minim dilakukan.

Tulisan ini diangkat dari hasil penelitian atas tata kelola sumber daya air di kawasan Pegunungan Kawi Kabupaten Malang. Pilihan atas lokasi penelitian dengan mempertimbangkan relatif amannya ketersediaan air pada kawasan pegunungan. Selain itu, terdapat keunikan tata kelola sumber daya air yang berlangsung di kawasan ini, utamanya terkait dengan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya mata air. Tulisan ini lebih memfokuskan pada analisis terhadap pola partisipasi masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan atas air berikut dinamika yang menyertainya.

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis tata kelola sumber daya adalah pendekatan kualitatif yang memberikan instrumen untuk lebih memahami makna melalui cara kerja analisis data secara induktif (Creswell, 2012). Pendekatan ini dipilih karena mampu menghasilkan data naratif terkait perilaku manusia, pemahaman latar belakang dan penjelasan atas kesimpulan yang berlangsung secara kontinu (Taylor dan Bogdan, 1984).

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu penelitian untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya di mana kasus tersebut terjadi (Salim, 2001). Penelitian kualitatif dengan metode studi kasus memfokuskan diri untuk mengetahui keumuman (*diversity*) dan kekhususan (*particularities*) dari subyek penelitiannya. Hasil yang diharapkan adalah penjelasan tentang keunikan dari kasus yang diteliti (Salim, 2001).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Krisis Air dan Tata Kelola Lingkungan**

Krisis air telah menjadi fenomena global. Diestimasi secara global, lebih dari 2,4 miliar orang masih memiliki kesulitan dalam hal sanitasi dan 2 miliar orang mengalami permasalahan kesehatan akibat kualitas air yang buruk (Marks, 2009). Krisis air pada akhirnya memiliki implikasi signifikan terhadap penurunan kualitas kesehatan dan kehidupan manusia. Terjadinya krisis air tidak hanya diakibatkan oleh faktor geografis dan terjadinya perubahan iklim. Krisis air juga dapat terjadi pada wilayah dengan potensi sumber mata air yang melimpah. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Buwono, Muda, dan Arsad (2017) yang mengambil lokasi di Kabupaten Malang, terjadinya krisis air lebih diakibatkan oleh minimnya upaya konservasi atas sumber daya air yang diabaikan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Penelitian di atas mengkonfirmasi hipotesis yang dikembangkan oleh John Urry (2015), yang menyatakan bahwa persoalan terkait dengan lingkungan merupakan implikasi dari keseluruhan pola interaksi sosial yang berkembang di masyarakat dalam memaknai, memandang, dan menggunakan sumber daya (hutan, air, energi) yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan pada akhirnya membutuhkan rekonstruksi atas struktur sosial yang dikembangkan oleh

masyarakat itu sendiri.

Pengelolaan lingkungan dan sumber daya berbasis komunitas menjadi salah satu alternatif yang dipromosikan oleh berbagai pihak. Inisiatif lokal dalam menyelesaikan persoalan lingkungan dan sumber daya menjadi salah satu faktor yang mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga negara, swasta, hingga lembaga internasional. Berbasis apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi persoalan krisis air di wilayahnya, Pratono dan Suwarso (2007) berargumen inisiatif dan keterlibatan aktif masyarakat dalam program mengatasi persoalan akses terhadap air bersih menjadi faktor determinan dalam kesuksesan program di Kota Surabaya.

### **Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya**

Partisipasi masyarakat dalam penanganan persoalan lingkungan dan krisis sumber daya tidak semudah yang dibayangkan. Berbasis pengalaman komunitas-komunitas masyarakat di India, upaya kolektif masyarakat untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan memperjuangkan hak atas air menghadapi tantangan yang luar biasa utamanya tatkala berhadapan dengan negara dan korporasi (Singh, 2016).

Dalam konteks demokrasi tata kelola lingkungan dan sumber daya, menempatkan partisipasi dari masyarakat merupakan bagian dari membangun demokrasi dari bawah. Secara konseptual, demokrasi dari bawah sejatinya menjadi sisi yang melengkapi pelembagaan demokrasi yang dikembangkan oleh negara maupun rezim politik global. Sebagaimana dikatakan Hiariej dan Stokke (2017), tidak berlangsungnya secara sempurna konsolidasi demokrasi dikarenakan kecenderungan mendekati demokrasi lebih pada pelembagaan demokrasi, namun kurang dalam memberikan ruang-ruang partisipatif bagi masyarakat untuk aktif dalam mengisi proses demokrasi yang tengah dikembangkan. Implikasinya, demokrasi mengalami pembajakan karena cenderung hanya menjadi domain elite yang memanfaatkan keuntungan-keuntungan yang dibuka oleh adanya institusionalisasi demokrasi prosedural (Hadiz, 2011; Hiariej dan Stokke, 2017).

*Citizenship* atau kewarganegaraan merupakan sifat yang dilekatkan pada warga negara sebagai sebuah bagian dari suatu negara. Kewarganegaraan ini bersifat sangat politis, pembentukannya melibatkan persaingan, ketegangan, dan konflik dalam

masyarakat luas (Hiariej dan Stokke, 2017). Kewarganegaraan formal dan aktual merupakan produk sekaligus strategi politik, yang lebih jauh dapat didefinisikan sebagai sebuah perjuangan untuk keadilan budaya, sosial, dan politik (Hiariej dan Stokke, 2017).

Stephen Ndegwa (1997) dalam Patterson (1999) menyatakan bahwa konsep kewarganegaraan (*citizenship*) dapat dipahami setidaknya dari dua perspektif yakni liberalisme dan komunalisme atau *civic-republican*. Perspektif liberalisme melihat *citizenship* sebagai hak-hak individu dalam kelompok masyarakat. Gagasan *citizenship* ala liberal menangkap ide bahwa manusia melihat diri mereka sebagai bagian dari entitas politik yang lebih besar yang mana memberikan mereka akses yang sama terhadap politik, sosial, dan hak-hak sipil (Patterson, 1999). Individu-individu tersebut, atau disebut sebagai warga negara, mengekspresikan ‘kewarganegaraannya’ melalui aktivitas partisipatif untuk menunjukkan bahwa warga negara memiliki hak-hak dalam proses pemerintahan di negara demokratis.

Sementara itu, Miller (1995) dalam Patterson (1999) menyatakan bahwa perspektif komunalisme melihat konsep ‘kewarganegaraan’ atau *citizenship* ini sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diberikan untuk negaranya. Menurut Stewart (1995) dalam Patterson (1999), komunalis melihat warga negara sebagai bagian dari *shared community*. Implikasinya, Oldfield (1990) dalam Patterson (1999) menyatakan bahwa individu sebagai warga negara dan bagian dari *shared community*, merasa memiliki tanggung jawab terhadap lingkungannya serta merasa bertanggung jawab untuk turut serta pencapaian tujuan bersama.

Masyarakat dalam negara demokrasi merupakan bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dalam proses berlangsungnya pemerintahan, termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks *citizenship* yang secara singkat telah dipaparkan di atas, maka ada upaya masyarakat sebagai warganegara untuk terlibat aktif atau berpartisipasi dalam terselenggaranya pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga di tingkat pemerintahan terkecil seperti desa.

Davis (1962) dalam Arnstein (1969) mendefinisikan partisipasi sebagai sebuah keterlibatan baik mental maupun emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk berkontribusi untuk mendukung atau menunjang tercapainya tujuan-tujuan kelompok serta turut bertanggung jawab terhadap kelompok tersebut.

Siagian (1985), membagi partisipasi menjadi dua, yakni partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi pasif dimaknai sebagai keterlibatan seseorang yang tidak bertanggung jawab penuh untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok namun perilaku serta tindakannya tidak mengakibatkan terhambatnya suatu kegiatan. Partisipasi aktif merujuk pada aktifitas yang turut serta memikirkan nasib sendiri dengan memanfaatkan lembaga sosial dan politik yang ada dalam masyarakat sebagai penyalur aspirasinya.

Dalam konteks tata kelola sumber daya, ada perasaan ‘memiliki’ dalam diri masyarakat terhadap sumber daya di lingkungannya. Partisipasi masyarakat menekankan pada keterlibatan individu dalam perencanaan, pengimplementasian dan pengaturan lingkungan lokal mereka (UNEP, 2004). Implikasinya, masyarakat dengan kesadaran diri ikut terlibat dalam pengelolaannya untuk kebaikan bersama.

### **Pengelolaan Sumber Mata Air di Gunung Kawi**

Keberadaan sumber mata air-sumber mata air di wilayah Gunung Kawi merupakan bagian dari keberadaan hutan yang berada di wilayah Gunung Kawi. Pada awal keberadaan hutan sejatinya pohon-pohon trembesi dan bambu yang memiliki fungsi menahan dan menyimpan air hujan menjadi air tanah.

Keberadaan hutan yang didominasi oleh pohon-pohon penyimpan air seperti trembesi dan bambu ini memberi kontribusi terhadap munculnya sumber mata air-sumber mata air di hutan yang berada di Gunung Kawi. Untuk saat ini, justru terlihat dominan pada wilayah Gunung Kawi adalah pepohonan jenis pinus dan karet, meski demikian pohon bambu masih bisa ditemui utamanya pada lokasi sekitar sumber air. Perubahan jenis pepohonan di hutan Gunung Kawi memiliki keterkaitan dengan program pemerintah yang mendorong tanaman-tanaman keras, yang memiliki nilai ekonomi sebagai komoditas ekspor, pada hutan-hutan negara sekitar tahun 1970-an.

Pada awalnya, penggunaan dan pemanfaatan air yang berasal dari sumber mata air di Gunung Kawi, khususnya yang berada di Desa Balaisari Kecamatan Ngajum dan Desa Wonosari Kecamatan Wonosari dilakukan secara sporadis dan spontan oleh masyarakat sekitar sumber mata air. Sekitar tahun 1948 sudah mulai ada mekanisme sederhana yang dibuat oleh masyarakat untuk memanfaatkan sumber mata air bagi kebutuhan air minum warga.

Karena letak sumber air Sumber Manggis dan Sumber Urip yang relatif jauh dari

permukiman penduduk Desa Balaisari dan Desa Wonosari, masyarakat kemudian bersama-sama membuat sistem untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke permukiman. Sistem yang dibuat menggunakan bambu yang disambung-sambung dari lokasi sumber mata air sampai ke rumah-rumah warga. Oleh masyarakat setempat sistem itu dinamakan dengan *Pring Kricik/Pring Kucur*.

Proses pembuatan *Pring Kricik/Pring Kucur* sebagai mekanisme untuk mengalirkan air dari sumber mata air ke rumah-rumah warga di Desa Balaisari dan Desa Wonosari merupakan hasil kerjasama antarwarga yang bergotong-royong membangun *Pring Kricik/Pring Kucur* sampai ke rumah-rumah warga yang membutuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem pengelolaan sumber mata air berikut pemanfaatannya dilakukan oleh masyarakat langsung yang membutuhkan ketersediaan air bagi kebutuhan minum dan rumah tangga.

Sistem pengelolaan sumber mata air di Desa Balaisari dan Desa Wonosari mulai mengalami pergeseran tatkala pemanfaatan sumber mata air di dua desa tersebut tidak lagi terbatas pada pemenuhan kebutuhan air minum dan rumah tangga warga, namun juga untuk kebutuhan warga dari luar Desa Balaisari dan Desa Wonosari yang datang ke Gunung Kawi untuk melakukan ziarah, tirakat, ibadah maupun melakukan wisata alam dan religi. Fungsi sumber mata air Sumber Manggis dan Sumber Urip pada akhirnya tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar atas air untuk warga sekitar, namun juga menopang geliat aktivitas wisata dan aktivitas religi yang semakin berkembang di Gunung Kawi.

Perkembangan dari pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis ini tidak terlepas dari adanya *kraton, pesarean* (makam), tempat peribadatan yang berada di sekitar Desa Balaisari dan Desa Wonosari. Di samping itu, adanya keinginan masyarakat luar untuk melakukan ritual mandi dan minum dari air yang berasal dari sumber mata air Sumber Manggis dan Sumber Urip ditangkap oleh masyarakat dengan menumbuhkan kreativitas ekonomi membuat pemandian-pemandian bagi warga yang datang di Desa Balaisari dan Desa Wonosari. Sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis pada akhirnya melayani dua fungsi yakni pemenuhan kebutuhan dasar atas air dan penunjang aktivitas ekonomi (wisata) berbasis pemanfaatan air.

Perkembangan dari fungsi sumber mata air di atas pada akhirnya turut

memengaruhi sistem pengelolaan sumber mata air. Adanya dampak ekonomis dari pengelolaan sumber mata air, utamanya terkait dengan aktivitas wisata (pemandian, penginapan/hotel) menjadi salah satu faktor yang menumbuhkan kebutuhan untuk mengelola sumber mata air secara lebih terstruktur, tidak lagi berbasis spontanitas dan tidak terlembaga. Konteks kebutuhan untuk lebih menstrukturkan kelembagaan pemanfaatan sumber mata air, utamanya untuk wisata, pada akhirnya mengubah sistem pengelolaan yang sebelumnya dilakukan secara bersama oleh masyarakat berganti mengarah pada sistem pengelolaan berbasis kelompok masyarakat

### **Transformasi Struktur Pengelola Sumber Air**

Hadirnya struktur pengelola pemanfaatan air dari sumber mata air Sumber Urip berawal dari kisah tentang kesembuhan warga dari luar wilayah Gunung Kawi yang meminum air yang berasal dari sumber mata air Sumber Urip. Kisah kesembuhan warga yang sebelumnya diindikasikan kritis dan mendapat kesembuhan setelah meminum air dari sumber mata air Sumber Urip akhirnya merebak ke warga-warga desa di sekitar wilayah Gunung Kawi yang membuat warga sekitar sumber air berbondong-bondong untuk ke sumber mata air Sumber Urip untuk memperoleh berkah yang sama.

Jika sebelum-sebelumnya fungsi sumber mata air Sumber Urip adalah untuk menopang kelangsungan hidup masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum dan rumah tangga, fungsi sumber mata air menjadi bertambah sebagai sumber penyembuhan yang menghidupkan warga akibat adanya perubahan persepsi atas fungsi sumber mata air Sumber Urip.

Hadirnya fungsi baru dari sumber mata air Sumber Urip ini pada akhirnya meningkatkan kuantitas jumlah orang yang datang berkunjung ke Desa Wonosari. Selain melakukan ziarah, *tirakat*, dan ibadah, warga yang datang juga mencari air yang berasal dari sumber mata air Sumber Urip untuk diminum. Di samping mencari air untuk diminum, kehadiran warga yang datang lebih dari satu hari juga membutuhkan air untuk sarana mandi dan bersih-bersih warga yang datang untuk ziarah, *tirakat*, dan ibadah. Adanya kebutuhan ini pada akhirnya menciptakan kebutuhan infrastruktur penunjang dalam bentuk permandian-permandian bagi warga yang datang ke Desa Wonosari.

Dari sinilah konteks hadirnya permandian-permandian baik dalam bentuk



permandian umum maupun permandian-permandian privat hadir di kawasan Gunung Kawi dapat dipahami tanpa mengurangi adanya faktor perluasan fungsi dari sumber mata air Sumber Urip sebagai sarana penyembuhan baik melalui metode diminum maupun digunakan sebagai air untuk mandi dan bersuci.

Persinggungan antara kebutuhan praktis dan persepsi atas fungsi air penyembuh menjadikan wisata pemandian di Desa Wonosari dan Desa Balaisari berkembang hingga saat ini. Hadirnya pemandian-pemandian ini menjadi penambah ritus-ritus yang dilakukan oleh warga yang datang ke kawasan Gunung Kawi dengan tidak hanya melakukan ziarah, *tirakat*, ibadah, namun juga melakukan mandi dan bebersih di pemandian dan atau minum air dari sumber mata air Sumber Urip.

Letak pemandian-permandian yang dibangun untuk warga yang datang ke kawasan Gunung Kawi berdekatan dengan lokasi makam maupun *kraton* yang menjadi tempat ziarah, *tirakat*, ibadah. Infrastruktur-infrastruktur untuk penyediaan tempat permandiaan bagi warga yang datang ke Gunung Kawi, karena letaknya berada di areal pemakaman, utamanya pemakaman pendiri desa: *Mbah Jugo*. Lebih memberikan kesempatan bagi para keturunan *Mbah Jugo* untuk mengambil inisiatif dalam penyediaan infrastruktur-infrastruktur sanitasi penunjang pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip.

Berawal dari sini kemudian terbangun struktur baru dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip. Jika sebelumnya, struktur pengelolaan sumber mata air Sumber Urip lebih bersifat spontan dilakukan bersama-sama dalam rangka pemenuhan kebutuhan air dan rumah tangga warga Desa, dengan adanya kebutuhan menghadirkan infrastruktur-infrastruktur sanitasi penunjang areal pemakaman maka terdapat struktur baru dalam pemanfaatan sumber mata air yang dikelola oleh keluarga besar keturunan *Mbah Jugo*.

Struktur baru dalam pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip merupakan kelanjutan dari kelembagaan yang telah dibentuk oleh keluarga keturunan *Mbah Jugo* untuk mengelola, menjaga, dan merawat pemakaman leluhur *Mbah Jugo*. Para keturunan *Mbah Jugo* telah membentuk sebuah lembaga dengan nama Yayasan Ngestigondo. Yayasan ini kemudian berkembang dalam proses pengelolaan, tidak hanya sebatas mengelola makam namun juga meningkat dalam mengelola infrastruktur sanitasi (toilet) dan pemandian yang dibangun di sekitar makam *Mbah Jugo*.

Kawasan Gunung Kawi pada akhirnya menjadi terkenal sebagai salah satu tempat wisata di Kabupaten Malang. Orang yang datang dari luar kawasan Gunung Kawi semakin banyak, tidak saja dari wilayah Kabupaten Malang, namun juga dari daerah yang relatif jauh dari Gunung Kawi. Kehadiran warga yang semakin banyak menumbuhkan kebutuhan untuk tempat penginapan bagi tempat peristirahatan orang luar daerah.

Struktur kesempatan yang terbuka akibat adanya kebutuhan tempat penginapan dimanfaatkan oleh warga Desa Wonosari dengan membangun tempat-tempat penginapan/hotel di wilayah Desa Wonosari. Berdasarkan data BPS tahun 2017, terdapat 91 penginapan/hotel di Desa Wonosari. Jumlah penginapan/hotel di satu desa yang mencapai angka 91 menunjukkan bahwa tingkat kehadiran orang ke kawasan Gunung Kawi cukup signifikan. Hal ini juga memberikan implikasi geliatnya ekonomi dari sektor wisata di Desa Wonosari.

Satu hal yang cukup menarik tatkala mencermati geliat ekonomi di Desa Wonosari terkait dengan tumbuhnya tempat-tempat penginapan/hotel adalah sebagian besar dari tempat penginapan/hotel merupakan milik warga yang masih memiliki garis keturunan leluhur desa yakni *Mbah Jugo*. Selain itu, warga yang masih memiliki garis keturunan *Mbah Jugo* juga mengelola lahan-lahan parkir bagi kendaraan-kendaraan pengunjung yang datang melakukan ziarah, *tirakat*, ibadah maupun wisata ke Desa Wonosari.

Konteks di atas menambah peran signifikan dari Yayasan Ngestigondo pada Desa Wonosari pada khususnya maupun kawasan Gunung Kawi pada umumnya. Yayasan Ngestigondo yang secara langsung aktif dalam mengelola kompleks pemakaman, pemandian, sarana sanitasi (toilet), tempat parkir, hingga penginapan/hotel di Desa Wonosari terlihat menjadi aktor utama dari perkembangan ekonomi desa, utamanya sektor pariwisata.

Pelebagaan terhadap proses pemanfaatan sumber mata air tidak hanya dilakukan oleh Yayasan Ngestigondo, namun juga oleh masyarakat di sekitar hutan yang berdekatan dengan letak sumber mata air. Di Desa Wonosari telah terbentuk kelembagaan yang disusun oleh sekelompok warga, utamanya yang berasal dari RW 1. Kelompok warga ini merupakan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang memiliki peran dalam pengelolaan sumber mata air di Desa Wonosari utamanya pada

sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis. LMDH yang dibentuk oleh warga RW 1 dinamakan LMDH *Sumber Marem*.

Salah satu peran signifikan yang dilakukan oleh LMDH adalah melakukan pemanfaatan sumber mata air untuk pemenuhan kebutuhan air minum warga. Aktifitas yang dilakukan adalah mengelola *Pring Kricik* yakni sistem pengaliran air dari sumber air menuju rumah-rumah warga di RW 1 untuk digunakan sebagai air minum dan kebutuhan keluarga. Meski strukturnya dibuat sederhana dengan hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Petugas Pemeliharaan, LMDH juga menjadi lembaga yang mengorganisir pertemuan-pertemuan warga di RW 1 untuk membahas tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan pengelolaan *Pring Kricik*, baik soal besaran kontribusi bagi pengguna layanan *Pring Kricik*, penentuan ekspansi pemanfaat layanan *Pring Kricik* di luar warga RW 1, hingga membahas perawatan sistem *Pring Kricik*.

Peran LMDH *Sumber Marem* dalam pengelolaan air dapat tumbuh dan berkembang juga disebabkan oleh keleluasaan yang diberikan perhutani kepada masyarakat untuk memanfaatkan sumber-sumber mata air yang letaknya berada pada hutan negara yang dikelola oleh Perhutani. Keleluasaan yang diberikan perhutani kepada LMDH merupakan berkah bagi masyarakat karena hingga saat ini dari pihak perhutani belum meminta kontribusi atas pemanfaatan sumber mata air yang dilakukan oleh LMDH.

Meski demikian, dengan perkembangan dari proses pemanfaatan sumber mata air baik yang dilakukan oleh LMDH maupun oleh Yayasan Ngestigondo, muncul wacana yang berkembang di lingkup Perhutani untuk menggagas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Perhutani, LMDH dan juga Desa. Perjanjian Kerja Sama tersebut akan diarahkan pada besaran debit air yang bisa diakses masyarakat serta persentase bagi hasil atas proses-proses pemanfaatan sumber mata air yang semakin terlihat besaran nilai ekonominya. Rencana membuat PKS ini juga untuk lebih memformalkan kerjasama yang telah berlangsung antara perhutani dengan LMDH yang telah sejak lama memanfaatkan air dari sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis.

### **Kompleksitas Tata Kelola Sumber Mata Air**

Upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonosari dalam pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis memberikan gambaran terkait

perkembangan tata kelola yang dilakukan masyarakat terhadap sumber mata air. Hal yang sangat terlihat jelas adalah terjadinya transformasi dalam hal pengelolaan sumber mata air. Jika pada awalnya, tata kelola sumber mata air dilakukan secara spontan dan dijalankan secara bersama-sama oleh masyarakat, dalam perjalanan waktu mulai bergeser ke arah tata kelola sumber mata air yang dilakukan secara lebih terstruktur melalui kelembagaan yang dibangun oleh kelompok masyarakat.

Hal ini secara jelas terlihat dari perkembangan aktivitas yang dilakukan oleh Yayasan Ngestigondo dan HIPAM Sumber Marem. Tumbuh dan berkembangnya Desa Wonosari sebagai tujuan wisata serta kebutuhan memudahkan masyarakat dalam mengakses air dari sumber air secara lebih mudah menjadi variabel penjelas dari pergeseran tata kelola sumber mata air dari spontan dan dilakukan bersama-sama menuju tata kelola sumber mata air yang terstruktur dan dilakukan oleh lembaga spesifik yang memiliki fokus pada pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis.

Transformasi berikutnya yang terjadi mengiringi perkembangan tata kelola sumber mata air di Desa Wonosari adalah adanya pola komersialisasi atas sumber daya air yang digunakan. Perkembangan tata kelola sumber mata air di Desa Wonosari semakin menunjukkan kuatnya logika-logika ekonomi dalam mengelola sumber daya air. Jika pada awalnya tata kelola sumber mata air dilakukan dengan pola bebas dan gratis, dengan hadirnya HIPAM Sumber Marem yang menjalankan pipanisasi dan penarikan iuran bulanan atas pemanfaatan air dari sumber mata air, tata kelola sumber mata air mulai mengarah pada sistem privatisasi sumber daya.

Komersialisasi sumber daya air semakin intens terlihat di Desa Wonosari mengiringi perkembangan ekonomi wisata religi. Terjadi pergeseran di mana sumber daya tidak lagi didekati sebagai 'sumber daya publik' yang bebas diakses tanpa konsekuensi, namun mulai didekati sebagai 'sumber daya privat' melalui prasyarat-prasyarat baru (iuran untuk memperoleh layanan) untuk bisa memperoleh akses terhadap air dari sumber mata air.

Transformasi yang lain yang juga mengiringi adalah semakin menguatnya gejala dominasi otoritas atas sumber mata air. Jika pada awal-awal pemanfaatan sumber mata air Sumber Urip dan Sumber Manggis berbagai komponen baik perhutani, desa, maupun kelompok masyarakat cenderung tidak terlalu mempersoalkan kepemilikan dan

otoritas atas sumber mata air, seiring dengan semakin membesarnya ‘profit’ yang dihasilkan dalam proses komersialisasi sumber mata air menjadikan berbagai pihak yang berada di sekitar sumber mata air mulai menginginkan untuk lebih terlibat dalam proses pemanfaatan sumber mata air sebagai salah satu mekanisme memperbesar keuntungan (ekonomi) dari hasil melibatkan diri dalam proses pemanfaatan sumber air.

Selain terkait dengan potensi ‘profit’ ekonomi yang semakin terlihat, kontestasi antara perhutani, kelompok masyarakat pengguna air juga terkait dengan aspek pengendalian atas penggunaan air dari sumber mata air. Berkembangnya sektor pariwisata di wilayah Desa Wonosari telah menciptakan keinginan-keinginan untuk memaksimalkan potensi sumber daya air yang ada. Terakhir adalah pembuatan *Coban Baung*. Inisiasi masyarakat yang membuat *Coban Baung* dengan mengambil air dari sumber mata air Sumber Urip dan Kali Gedong telah memperbesar debit air yang diambil dari sumber-sumber mata air tersebut. Pihak perhutani mulai melihat perlu adanya pengontrolan dalam pemanfaatan sumber mata air. Salah satu yang dilakukan adalah dengan menurunkan besaran pipa dari 4 dim menjadi 2 dim untuk instalasi pemasangan pipa-pipa ke rumah warga yang baru mendaftar untuk bergabung dalam HIPPAM.

Selain itu, mulai digagas tentang kuota debit yang perlu diatur dalam rangka menjaga ketersediaan dan keberlangsungan sumber mata air. Pengaturan kuota debit ini dikarenakan pihak perhutani melihat bahwa saat ini pemanfaatan sumber mata air tidak lagi hanya sebatas untuk pemenuhan kebutuhan pokok air minum warga, namun juga sudah dikembangkan ke arah ekonomi pariwisata yang menggunakan air dari sumber mata air sebagai salah satu komponen utama pengembangan wisata.

Di sisi lain, kelompok masyarakat juga mulai memiliki kepentingan untuk dapat lebih besar akses terhadap sumber mata air. Sudah ada permintaan yang ditujukan kepada pihak perhutani agar sumber mata air, utamanya sumber mata air Sumber Urip, untuk bisa diserahkan kepada masyarakat dengan harapan masyarakat lebih bisa mengoptimalkan penggunaan sumber mata air. Sampai pada saat penelitian ini berlangsung, upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat untuk mendapatkan akses penuh terhadap sumber mata air Sumber Urip masih belum memperoleh persetujuan dari pihak perhutani.

Belum diperolehnya persetujuan dari pihak perhutani lebih didasarkan pada

kekhawatiran akan terjadinya eksploitasi air dari sumber mata air dan mengancam keberlangsungan dari sumber mata air itu sendiri. Kekhawatiran ini didasarkan pada semakin besarnya pemanfaatan air dari sumber mata air untuk pemanfaatan pada sektor pariwisata, utamanya yang mendukung sarana permandian, *coban*, penginapan/hotel, maupun fasilitas sanitasi (toilet umum) bagi pengunjung yang datang ke Desa Wonosari.

Kontestasi yang semakin terlihat dalam tata kelola sumber mata air di Desa Wonosari juga menunjukkan adanya pergeseran secara signifikan makna sumber mata air oleh masyarakat. Jika sebelumnya sumber mata air lebih sebagai sarana untuk menunjang kehidupan masyarakat Desa Wonosari, melalui penyediaan air bagi kebutuhan minum dan rumah tangga, saat ini telah berkembang ke arah air sebagai faktor penting bagi pengembangan ekonomi pariwisata di Desa Wonosari. Sumber mata air menjadi semakin menjadi komoditas yang dimaksimalkan untuk orientasi keuntungan (ekonomi). Pergeseran pemaknaan atas sumber mata air ini jika terus berlangsung dan membesar akan memberi tekanan pada keberlangsungan sumber daya. Sejuahmana pergeseran pemaknaan atas sumber mata air yang semakin besar pada fungsi ekonomi memberi tekanan terhadap fungsi sosial dan fungsi ekologis menjadi kajian penting untuk lebih didalami.

Konteks beberapa pergeseran yang terjadi seiring dengan perkembangan pemanfaatan sumber mata air sebagaimana dipaparkan diatas semakin menciptakan kompleksitas tatkala dilihat dari sudut pandang ekologi. Terdapat kesan dimana sumber daya air masih dilihat sebagai 'sumber daya tidak terbatas' dan kurang tergambar adanya kekhawatiran atas keterancaman terkait ketersediaan sumber daya. Gambaran ini bisa dilihat dari pilihan mekanisme yang digunakan oleh HIPPAM Sumber Marem yang memilih menggunakan sistem *los* (bebas) dibandingkan dengan sistem *meteran* (kuota). Salah satu implikasi dari pilihan sistem ini adalah masyarakat bebas memanfaatkan sebesar apapun yang diinginkan dan bahkan limbah-limbahan air yang mengalir ke rumah-rumah warga terbuang secara percuma karena tidak ada sistem untuk menyetop aliran air yang dikirim ke rumah-rumah warga. Lazim terlihat limbah air yang terbuang percuma karena proses aliran air yang berlangsung terus-menerus.

Transformasi-transformasi yang tengah berlangsung di Desa Wonosari memberikan kompleksitas atas pengembangan tata kelola sumber mata air.

Kompleksitas yang tengah berlangsung juga telah mulai terlihat menumbuhkan bibit-bibit konflik/kontestasi akibat semakin kuatnya tarik-menarik kepentingan dari pihak-pihak yang berada di sekitar sumber mata air. Selain tumbuhnya bibit kontestasi antar komponen masyarakat, hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah tentang pemaknaan atas sumber daya yang cenderung semakin mengarah pada orientasi-orientasi ekonomi dibandingkan dengan orientasi-orientasi sosial dan ekologis.

### **Kesimpulan**

Kelangkaan barang publik berupa sumber air bersih menjadi permasalahan yang kedepan yang dihadapi berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Malang. Adanya fenomena krisis atas air yang terjadi di Kabupaten Malang telah menciptakan momentum untuk melakukan pengkajian atas tata kelola sumber air. Hadirnya kemandirian warga dalam memastikan pemenuhan atas barang publik berupa air bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat menjadi fondasi penting bagi penyelesaian permasalahan air. Upaya-upaya partisipasi dari bawah yang dilakukan oleh masyarakat membentuk ruang-ruang yang semakin lebar bagi hadirnya *republican citizenship* di tingkat bawah. Ketiadaan peran dari aktor lain (misalnya pemerintah maupun swasta) pada penyediaan barang publik di tingkat masyarakat telah memunculkan ruang bagi terbangunnya partisipasi dan solidaritas kolektif di tingkat bawah.

Kontestasi kuasa atas tata kelola air akan semakin menguat tatkala pengelolaan atas air menciptakan pertambahan nilai ekonomi-politik baik pada sumber daya air maupun pada kelembagaan yang mengurus air. Kontestasi kuasa yang berkorelasi dengan nilai ekonomi-politik dari barang publik yang ada di tingkat desa akan menjadi wujud dari dinamika perpolitikan di tingkat bawah. Tatkala nilai ekonomi-politik dari sumber daya di tingkat bawah semakin besar, kehadiran aktor-aktor yang sebelumnya mengabaikan sumber daya desa menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Penelitian-penelitian lanjutan terkait dengan kontestasi kuasa di tingkat desa, utamanya tatkala pemerintah supra desa dan/atau perusahaan menjadikan desa berikut potensi sumber daya yang dimilikinya menjadi penting untuk dilakukan. []

### **Daftar Referensi**

- Arnstein, S.R. 1969. "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Planning Association* 35 (4): 216-224.
- Buwono, N. R., G. O. Muda, dan S. Arsad. 2017. "Pengelolaan Mata Air Sumberawan Berbasis Masyarakat di Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang." *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan* 9 (1): 25-36.
- Creswell, J.W. 2012. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadiz, V. 2011. *Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford: Stanford University Press.
- Hiariej, E., dan K. Stokke. 2017. *Politics of Citizenship in Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Marks, S. 2009. *Water Shock: Water in Crisis*. New Jersey: John Willey & Sons.
- Patterson, A. S. 1999. "The Dynamic Nature of Citizenship and Participation: Lesson from Three Rural Senegalese Case Studies." *Journal of Africa Today* 46 (1): 3-27.
- Pratono, A., dan B. Suwarso. 2007. "Community-Based Environmental Governance: A Community Movement in Surabaya." 20 Maret. [www.wepa-db.net/pdf/0810forum/paper30.pdf](http://www.wepa-db.net/pdf/0810forum/paper30.pdf).
- Salim, A. 2001. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Siagian, S. P. 1985. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Singh, N. 2016. *The Human Right to Water: From Concept to Reality*. Switzerland: Springer.
- Taylor, S. J., dan R. Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meaning*. New York: John Wiley & Sons.
- UNEP. 2004. "Environmental Management and Community Participation: Enhancing Local Programmes." Diakses Oktober 4, 2016. <http://www.unep.or.jp>
- Urry, J. 2015. "Climate Change and Society." Dalam *Why the Social Science Matter*. New York: Palgrave-Macmillan.
- WALHI Jatim. 2012. *Dampak Kekeringan: 13 Kecamatan di Malang Krisis Air*. 11 September. <http://walhijatim.or.id>.